

Pelaksanaan pasal 8 Perda no. 9 tahun 2009 tentang “Retribusi Rumah Potong Hewan” di Kabupaten Tana Toraja



JURNAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar

Sarjana Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

OLEH :

Anastasia Lidwina

E111 11 102

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik

Universtas Hasanuddin

MAKASSAR

2016

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 9 tentang “Retribusi Rumah Potong Hewan” di Kabupaten
Tana Toraja**

Disusun dan diajukan oleh

ANASTASIA LIDWINA

E111 11 102

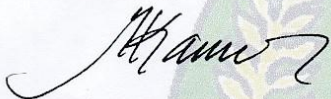
Telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 25 Februari 2016

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA
NIP 195206061981031020

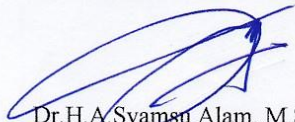
Pembimbing II



Dr. Ariana Yunus, M.Si
NIP 197107051998032002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H.A. Syamsu Alam, M.Si
NIP 19641231 198903 1 027

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Politik



Dr. H. Baharuddin, M.Si
NIP 19570102 198503004

LEMBAR PENGESAHAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PASAL 8 PERDA NO. 9 TENTANG “RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN” DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

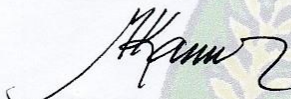
ANASTASIA LIDWINA

E111 11 102

Jurnal ini dibuat Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

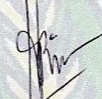
Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA
NIP 195206061981031020

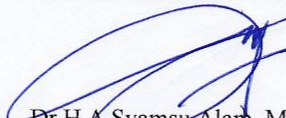
Pembimbing II



Dr. Ariana Yunus, M.Si
NIP 197107051998032002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si
NIP 19641231 198903 1 027

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Politik



Dr. H. Baharuddin, M.Si
NIP 19570102 198503004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Berkah dan RahmatNya yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang ada dalam skripsi ini adalah kebenaran subjektif bagi diri penulis. Untuk itu, perbedaan pendapat mengenai kandungan skripsi ini adalah hal yang wajar dan justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali sehingga kebenaran hakiki dapat kita peroleh.

Penulis menyadari bahwa mungkin inilah hasil yang maksimal yang dapat disumbangkan. Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga penulis selalu menyediakan ruang untuk menampung kritik dan saran dari semua pihak demi pencapaian kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Bernadus Aris yang senantiasa memberikan dukungan dan Ibunda Miranista Sariang yang telah senantiasa memberi curahan kasih sayang, doa, nasehat hingga akhir hayatnya sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini

dapat terlaksana dengan baik hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Kakakku Anugrah yang selalu mendukung saya. Segenap ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kalian yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik hingga sekarang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof.Dr.A.Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr.H. Andi Syamsu Alam, M.Si selaku Ketua Dan Bapak A.Naharuddin, S.Ip.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
4. Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA. selaku pembimbing I dan Ibu Ariana Yunus, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Prof. Basir Syam, MA selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing di saat perkuliahan.

7. Bapak/Ibu selaku dosen Ilmu Politik Pemerintahan Fisip Unhas terima kasih atas semua kuliah-kuliah inspiratifnya.
8. Seluruh staf pegawai Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Kak Monik, Bu Hasnah, dan Kak Nanna yang senantiasa memberikan arahan dalam mengurus berkas.
9. Saudara-saudaraku tercinta INTEGRITAS 2011, icha, kiki, ulan, ocha, al, gusty, indah, aya, ramlah, nur, arny, sukma, satria, daen, azis, atto, basir, men, arrang, madi, sofyan, imron, marko, fahri, naje, asho, illang, tiar, anto, harun, rahman, dan tri yang selalu memberikan dukungan,hiburan dan candaan.
- 10.Keluarga besar KKN Gelombang 87
- 11.Bapak-bapak dan ibu-ibu informan masyarakat Tana Toraja yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

Penulis telah berupaya dengan maksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa.

Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Makassar, Februari 2016

Anastasia Lidwina

ABSTRAK

Anastasia Lidwina. NIM E111 11 102. Pelaksanaan pasal 8 Perda no. 9 tahun 2009 tentang “Retribusi Rumah Potong Hewan” di Kabupaten Tana Toraja. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA dan Ariana Yunus, S.IP, M.Si.

Adat istiadat adalah hal yang sangat penting di kehidupan masyarakat tana toraja. Bisa dikatakan masyarakat tana toraja tidak bias dipisahkan dari adat istiadat yang merekajalankan, adat istiadat yang telah diturunkan nenek moyang mereka ini sangat mereka junjung tinggi didalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan tidak sedikit masyarakat Tana Toraja akan melakukan hal apapun untuk menjalankan adat istiadat mereka ini termasuk mengesampingkan aturan-aturan agama yang mereka anut. Pesta pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan hewan ternak. Semakin berkuasa seseorang maka semakin banyak hewan ternak yang disembelih. Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan hewan-hewan ternak untuk melakukan perjalanannya dan akan lebih cepat sampai di Puya atau yang biasa disebut dengan tempat peristirahatan terakhir bagi yang meninggal.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengimplementasian pasal 8 perda no. 9 tahun 2009 di masyarakat Tana Toraja. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus dengan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam informan yang dianggap memahami tentang Pelaksanaan pasal 8 Perda no. 9 tahun 2009 tentang “Retribusi Rumah Potong Hewan” di Kabupaten Tana Toraja.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan daerah no.9 tahun 2009 tentang retribusi rumah potong hewan di kabupaten tana toraja di nilai sangat memberatkan masyarakat karena nominal pajak yang harus dibayar masyarakat sangatlah mahal. Oleh karena mahalnya pajak yang harus dibayar masyarakat menjadi masalah besar. Adanya kecurigaan-kecurigaan yang timbul apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan dengan adanya perda ini ataukah adanya konflik kepentingan yang terjadi dengan adanya perda ini menjadi salah satu pertimbangan akibat di sahkannya perda ini.

Adanya aksi penolakan oleh beberapa kelompok masyarakat juga menambah masalah dengan adanya perda ini, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang merasa pengimplementasian perda no.9 tahun 2009 ini sangat merugikan pihak masyarakat

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Penerimaan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstraksi.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendekatan Kebijakan Publik.....	12
B. Konflik Kepentingan.....	21
C. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi penelitian.....	40
B. Tipe Penelitian dan dasar penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Sosial Politik Tana Toraja.....	43
B. Kondisi wilayah Kabupaten Tanah Toraja.....	45
C. Kependudukan Tana Toraja.....	47
D. Peraturan daerah No.9 tahun 2009.....	49

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perda no.9 tahun 2009.....	51
B. Pihak yang terlibat dalam pembuatan perda.....	54
C. Pihak yang diuntungkan atas pembuatan perda.....	56
D. Pengimplementasian perda dalam masyarakat.....	62
E. Tanggapan masyarakat terhadap perda.....	66

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kabupaten Tana Toraja, sebagai salah satu daerah yang terdapat di Sulawesi Selatan merupakan salah satu kawasan yang menyimpan beragam kekayaan, baik yang bersifat kekayaan alam maupun kekayaan adat istiadat yang selalu mengisi setiap ruang dalam aktifitas tradisional yang terdapat dalam masyarakat Tana Toraja.

Sebuah anugerah yang kuasa dari Tuhan, bahwa dengan kekayaan alam yang ada berada di Tana Toraja rupanya menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat yang di Tana Toraja sendiri. Kekayaan tradisi yang bisa dilihat dari aktifitas adat istiadat masyarakat Tana Toraja menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintahan daerah di Tana Toraja adalah bidang pariwisata sendiri.

Adat istiadat adalah hal yang sangat penting di kehidupan masyarakat tana toraja. Bisa dikatakan masyarakat tana toraja tidak bisa dipisahkan dari adat istiadat yang mereka jalankan, adat istiadat yang telah diturunkan nenek moyang mereka ini sangat mereka junjung tinggi didalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan tidak sedikit masyarakat tana toraja akan melakukan hal apapun untuk menjalankan adat istiadat mereka ini termasuk mengesampingkan aturan-aturan agama yang mereka anut.

Di Tana Toraja terdapat dua upacara adat yang amat terkenal yaitu upacara adat *Rambu Solo* dan upacara adat *Rambu Tuka*. Upacara adat *Rambu solo* diperuntukkan untuk upacara pemakaman dimana masyarakat toraja

melakukan pesta secara besar-besaran untuk menghormati leluhur mereka yang telah meninggal karena masyarakat di Tana Toraja percaya bahwa tujuan melakukan upacara pemakaman tersebut ialah selain menghormati arwah roh yang meninggal juga sebagai cara menghantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka ditempat peristirahatan yang abadi.

Sedangkan upacara *rambu tuka* adalah upacara adat yang berhubungan dengan acara syukuran, dimana didalam upacara ini seluruh masyarakat toraja merasakan kegembiraan. Seperti acara pernikahan, syukuran panen dan peresmian rumah atau tongkonan yang baru.

Dalam agama aluk, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar pesta pemakaman yang besar. Seluruh upacara dalam rangkaian penguburan mayat ini memerlukan biaya yang besar. Itu ditanggung oleh yang bersangkutan disamping sumbangan-sumbangan yang berasal dari kerabat-kerabat namun sumbangan itu bersifat hutang sehingga harus dibayar kembali ketika ada kerabat yang kehilangan keluarga. Besar kecilnya upacara mencerminkan tingkat kekayaan suatu keluarga.

Pesta pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut rante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas, selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi, dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Musik suling, nyanyian, lagu dan puisi, tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja

tetapi semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak, orang miskin, dan orang kelas rendah.

Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan hewan ternak. Semakin berkuasa seseorang maka semakin banyak hewan ternak yang disembelih. Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan hewan-hewan ternak untuk melakukan perjalanannya dan akan lebih cepat sampai di *Puya* atau yang biasa disebut dengan tempat peristirahatan terakhir bagi yang meninggal. Penyembelihan puluhan hewan ternak merupakan puncak upacara pemakaman yang diringi musik dan tarian para pemuda yang menangkap darah yang muncrat dengan bambu panjang.

Terkait dengan hal tersebut untuk masyarakat Tana Toraja, hewan ternak seperti kerbau, babi, rusa dan lain-lain merupakan hewan ternak yang tidak bisa dipisahkan dengan adanya pematangan hewan yang merupakan bagian dari rangkaian upacara di Tana Toraja. Hewan ternak ini merupakan ternak penghasil protein hewani yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab hewan ternak ini selain mudah untuk dipelihara juga sanggup untuk memanfaatkan rumput berkualitas rendah, mudah beradaptasi dengan lingkungan serta selain dari pada itu hewan ternak ini sangat bermanfaat dalam kegiatan sosial budaya masyarakat Toraja.

Salah satu hewan ternak dari banyaknya hewan ternak yang di potong, kerbau adalah hewan ternak yang banyak diminati oleh masyarakat tana toraja. maka dari itu mengingat bahwa upacara kematian dan upacara syukuran di tana Toraja tidak bisa dipisahkan dari kerbau yang dijadikan sebagai hewan kurban, bahkan dilakukan pematangan kerbau secara besar - besaran. Jumlah kerbau yang dikorbankan menjadi salah satu tolak ukur kekayaan atau

kesuksesan anggota keluarga yang sedang menggelar acara. Kebanggaan akan hal tersebut terlihat dari jumlah tanduk kerbau yang dipasang pada bagian depan *Tongkonan* (rumah tradisional Toraja) keluarga penyelenggara upacara *Rambu Solo'*. Jumlah kerbau yang dipersembahkan bisa mencapai ratusan ekor dan menghabiskan dana hingga miliaran rupiah (Yulius, 2012).

Upacara adat istiadat yang berlangsung di Tana Toraja yang sangatlah erat kaitannya atau tidak lepas dengan adanya pemotongan hewan sebagai bagian dari rangkaian upacara di Tana Toraja ini sangatlah menarik perhatian para wisatawan-wisatawan baik didalam maupun luar negeri. Secara umum dengan berdatangnya banyak wisatawan ke Tana Toraja selain turut meningkatkan dunia perekonomian masyarakat, adanya retribusi sehubungan dengan pemotongan hewan menjadi pendapatan khusus daerah dalam bentuk pajak. Sebagai bentuk usaha dalam pengembangan dan pembangunan daerah, diharapkan dengan hal semacam ini mampu mendorong tingkat perekonomian Kabupaten Tana Toraja. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh adat istiadat yang bisa dibilang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat inilah maka secara tidak langsung berimbas ke pemerintahan yang ada di kabupaten tana toraja ini. Potensi pemotongan hewan ternak yang terus meningkat tersebutlah membuat pemerintah kabupaten tana toraja yang mengambil kebijakan untuk menetapkan pajak restribusi.

Pemerintah kabupaten tana toraja bersama DPRD pada tahun 2001 membuat peraturan yang tertulis pada perda no.4 Tahun 2001 tentang pajak retribusi rumah potong hewan dimana setiap masyarakat tana toraja yang

melakukan atau menghadiri upacara adat seperti upacara adat *rambu solo* ataupun upacara adat *rambu tuka* dan melakukan pemotongan hewan-hewan ternak dikenai biaya atau pajak.

Tidak hanya sampai disitu saja, pada tahun 2009 pemerintah kabupaten tana toraja menaikkan harga pajak retribusi rumah potong hewan ini dengan nominal yang cukup meresahkan masyarakat di kabupaten tana toraja itu sendiri.

Dibawah ini adalah biaya pajak yang dikenakan pada masyarakat tana toraja yang melakukan pemotongan hewan-hewan ternak yang secara resmi telah tertulis dalam peraturan daerah kabupaten tana toraja :

Tabel 1

Pajak Restribusi.

Retribusi rumah potong hewan tanah toraja	
-Sapi dan Kerbau	Rp. 52.500,-
- Babi	Rp. 26.000,-
- Kambing dan Domba	Rp. 25.000,-

Sumber : perda no. 4 tahun 2001¹

Pemerintah tana toraja melihat potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat besar dari pajak rumah potong hewan maka dari itu pemerintah tanah toraja mengeluarkan perubahan perda no.4 tahun 2001 tentang retribusi rumah potong hewan no.9 tahun 2009. Dalam perubahan tersebut pemerintah

¹ Lembaga Daerah Kabupaten Tana Toraja, 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 tahun 2009. Hal. 3

memberlakukan pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak dan tempat pemotongan hewan ternak diluar Rumah Potong Hewan yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tabel II

Retribusi rumah potong hewan tanah toraja	
1. Kerbau	Rp.150.000,-/ekor
2. Sapi	Rp.100.000,-/ekor
3. Kuda	Rp.100.000,-/ekor
4. Rusa	Rp. 75.000,-/ekor
5. Babi	Rp. 75.000,-/ekor
6. Kambing	Rp. 45.000,-/ekor
7. Pa'piong (Daging Hewan yang sudah dimasak dalam bambu)	Rp. 30.000,-

Sumber : Perubahan Perda Kabupaten Tana Toraja no.4 tahun 2001 Tentang retribusi rumah potong hewan dalam perda No. 9 tahun 2009²

Dari tabel tersebut merupakan pajak retribusi yang harus di bebaskan kepada tempat pemotongan hewan ternak diluar rumah potong hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setelah perubahan perda no.4 tahun 2001 yang terdapat dalam perda no.9 tahun 2009 dimana biaya retribusi sebelumnya hanya di bawah 50% saja telah membebani setiap masyarakat tanah toraja yang mengadakan pesta, jutru karena dengan alasan pemerintah bahwa pajak retribusi ini dapat meningkatkan bahkan

² Ibid, hal. 4

menjadi pendapat asli daerah (PAD) paling besar maka pemerintah memutuskan untuk mengubah perda no.4 tahun 2001 yang awalnya bertujuan untuk menekan tingkat permintaan hewan potong di tanah toraja menjadi pendapatan daerah paling besar karena melihat semakin banyaknya acara rambu tuka dan rambu solo di tanah toraja sehingga menjadi 50% retribusi yang harus dikeluarkan setiap penyelenggara acara.

Pemerintah dalam memberikan fasilitas pada rumah potong hewan juga tetap memberikan pajak kepada instansi Teknis yang melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak diberikan insentif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan bersih retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten sehingga bahkan dalam pelayanan pun pemerintah memberikan pajak, alhasil akan berdampak pada mahalnnya biaya pelayanan pada masyarakat.

Adanya pro dan kontra juga tidak terlepas dari perda ini, adanya perbedaan pendapat menyebabkan masyarakat dan beberapa kelompok-kelompok yang keberatan dengan adanya perda ini, menurut masyarakat perda yang menurut mereka memberatkan masyarakat tidak lepas dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalam-Nya.

Adanya retribusi pemotongan maka memberikan beban tersendiri bagi masyarakat yang akan melakukan pemotongan ternak kerbau, khususnya masyarakat yang akan memotong kerbau belang. Dimana harus membayar iuran yang cukup besar, setiap akan melakukan pemotongan kerbau. Sehingga retribusi ini mestinya diikuti dengan sistem pelayanan yang semakin baik. Namun kenyataannya pelayanan yang diberikan pihak kecamatan masih kurang optimal.

Dengan melihat hal tersebut, maka sebagai dampak dari retribusi pemotongan hewan ternak yang perlu diamati yaitu masyarakat yang melakukan

pemotongan merasa tidak dirugikan akibat retribusi, apakah sistem pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat sudah baik, khususnya bagi masyarakat yang memotong kerbau di Luar RPH seperti pemotongan kerbau (pada pesta adat *Rambu Tuka* dan *Rambu Solo*) yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah.

Masyarakat tana toraja merasa keputusan yang diambil oleh pemerintah sangatlah tidak adil bagi mereka apalagi bagi masyarakat yang sedang melangsungkan pesta ada khususnya pesta adat rambu solo (upacara kematian). Bagaimana tidak, menurut mereka ini sangat membebani mereka karena mereka sedang di posisi yang sedang berduka dan sangat memerlukan banyak biaya untuk melangsungkan upacara pemakaman bagi sanak saudara mereka yang telah meninggal dan pemerintah tetap saja mengenakan mereka sanksi yang sangat mahal.

Masyarakat yang merasa terbebani dengan pajak yang terbilang sangat mahal mencoba melihatkan rasa keberatan mereka terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten tana toraja dengan mencoba menyuarakan rasa keberatan mereka kepada yang mereka anggap bertanggung jawab dalam mengambil keputusan pajak yang mereka harus bayar ini.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, kajian, dan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaa Pasal 8 Perda NO.9 Tahun 2009 Tentang “Retribusi Rumah Potong Hewan” di Kabupaten Tana Toraja”.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang menyangkut persoalan perubahan perda No.9 tahun 2009 tentang rumah potong hewan maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan pasal 8 perda no. 9 tahun 2009 tentang ‘rumah potong hewan’ dikabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengimplementasian pasal 8 perda no. 9 tahun 2009 di masyarakat Tana Toraja.

D. Manfaat penelitian

i. Manfaat akademik

- a. Mendorong munculnya penelitian baru dalam bidang ini, sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan.
- b. menjawab fenomena sosial politik yang ada
- c. menunjukan secara ilmiah implikasi perda no.9 tahun 2009 pasal 8

ii. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik
- b. Untuk membantu para pelaku politik memahami realitas politik di selawesi selatan

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pendekatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari Kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*Public Policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan – tujuan, nilai – nilai, dan praktik – praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*). Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program – program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai – nilai”, dan “praktik”.

Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*). Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”. Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan :

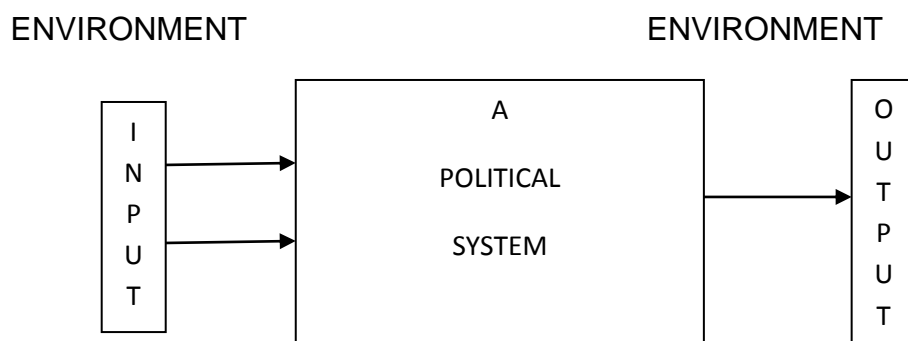
Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato – pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program – program dan tindakan pemerintah.

Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama– sama menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk dalam hal “keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun”.

Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Di lihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. David Easton dan Nugroho (2008 :383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi.

Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem publik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output, seperti digambarkan sebagai berikut.

Gambar II.2. Proses Kebijakan Publik Menurut Easton



Sumber. David Easton dalam Nugroho (2008:383)

Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Model Easton ini tergolong dalam model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky.

Menurut James A. Anderson, dkk. dalam Tilaar dan Nugroho (2005:186) Dijelaskan bahwa tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

Stage 1: *Policy agenda*, yaitu *those problems, among many, which receive the serious attention of public officer.*

Stage 2: *Policy formulation*, yaitu *the development of pertinent and acceptable proposal courses of action for dealing with problem.*

Stage 3: *Policy adoption*, yaitu *the development of support for a specific proposal so that policy can legitimated or authorized.*

Stage 4: *Policy implementation*, yaitu *application of the policy by the government's administrative machinery to problem.*

Stage 5: *Policy evaluation*, yaitu *effort by the government to determine whether the policy was effective and why, and why not.*

Pakar lain, Dye mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir mirip dengan model Anderson, dkk. tersebut. Menurut Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:189) proses kebijakan publik adalah sebagai berikut : Sumber: Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 189), Di model Dye terlihat bahwa proses kebijakan Anderson, dkk. mendapatkan satu tambahan tahap sebelum *agenda setting*, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (*agenda setting*) yang terlewatkan oleh Anderson,

dkk.. Selain itu Dye juga menggantikan tahap *policy adoption* dengan *policy legitimation*. Namun dalam hal ini pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk. dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.

Selain teori proses kebijakan dari Anderson, dkk. dan Dye terdapat teori lain seperti dari William N. Dunn dan Patton & Savicky. Baik Dunn maupun Patton & Sawicky mengemukakan model-model proses kebijakan yang lebih bersifat siklis daripada tahap tahap/*stages*. Dunn menambahkan proses *forecasting*, *recommendation*, dan *monitoring*. Hampir sama seperti Anderson, dkk. maupun Dye, Dunn membuat analisis pada tiap tahap dari proses kebijakan dari model Anderson, dkk. dan Dye.

Menurut Edwards (1980: 10) komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten Edwards III menyatakan: "*Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear accurate, and consistent*". Dalam hal ini Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat keputusan/*decision maker* berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendaknya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/*discretion* pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas serta spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat,

jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

Pada tiap tahap kebijakan Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang semestinya dilakukan. Pada tahap penyusunan agenda/*agenda setting*, analisis yang mesti dilakukan adalah perumusan masalah/*identification of policy problem*. Dalam hal ini Dunn membuat sintesis dari model Anderson, dkk. dan Dye yaitu menggabungkan tahapan antara *identification of problem* dan *agenda setting* dari Dye dengan tahap *policy agenda* dari Anderson. Pada tahap formulasi kebijakan/*policy formulation*, terdapat langkah analisis yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan/*forecasting*. Dunn menjelaskan :

Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan, erosi kelas menengah, dan penurunan standar hidup. Pada tahap evaluasi kebijakan Dunn menyatakan bahwa tahap ini tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan namun juga memberikan klarifikasi sekaligus kritik bagi nilai-nilai yang mendasari kebijakan, serta membantu penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Dalam hal ini evaluasi juga memberikan feedback bagi perumusan masalah, sehingga model Dunn ini juga mengkompromikan model yang diusulkan pertama kali oleh Easton.

Menurut Nugroho (2008: 387) model-model kebijakan dari Easton, Anderson, dkk., Dye, Dunn, maupun Patton dan Savicky tersebut di atas memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari *formulasi* menuju *implementasi*, untuk mencapai *kinerja kebijakan*. Nugroho (2008: 387) menyatakan

“...Ada satu pola yang sama, bahwa model format kebijakan adalah “gagasan kebijakan”, “formalisasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan—yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan...”.

Dari teori-teori proses kebijakan kita dapat melihat tiga kata kunci yakni “formulasi, “implementasi”, dan “kinerja”. Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mengenai implementasi kebijakan, Nugroho (2008: 501) menyatakan.

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.

Melihat bahwa implementasi merupakan tugas yang memakan sumber daya/resources paling besar, maka tugas implementasi kebijakan juga sepatutnya mendapatkan perhatian lebih. Terkadang dalam praktik proses kebijakan publik, terdapat pandangan bahwa implementasi akan bisa berjalan secara otomatis setelah formulasi kebijakan berhasil dilakukan. Nugroho (2008: 484) menyatakan *implementation myopia* yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah “Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan dengan sendirinya”. Terkadang sumber daya sebagian besar dihabiskan untuk membuat perencanaan padahal justru tahap implementasi kebijakan yang seharusnya memakan sumber daya paling besar, bukan sebaliknya.

Tujuan pembuatan kebijakan publik tidak terlepas dari isi kebijakan itu sendiri. Menurut Surbakti pada dasarnya isi kebijakan public dibedakan menjadi empat meliputi : *Pertama*, Kebijakan regulative terjadi apabila kebijakan mengandung

paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya kebijakan regulative dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan suatu tindakan yang tak diperbolehkan, seperti UU hokum Pidana, UU antimonopolydll.

Kedua,Kebijakan redidtributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga Negara tetapi penerapannya melalui lingkungan. Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan redistributive.

Ketiga, Kebijakan distributive ditandai dengan pengenaan paksaan secara langsung, tetapi kebijakan iitu diterapkan secara langsung terhadap individu. Dampak dari kebijakan ini berpengaruh pada individu secara langsung, seperti pendidikan dasar yang bebas biaaya, subsidi biaya sekolah, dll.

Keempat, kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan secara tidak langsung melalui lingkungan.

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: *Pertama*, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); *Kedua*, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan *Ketiga*, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Dunn dalam Dwidjowijoto menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

- b. Fase *Penyusunan agenda*, dimana para pejabat baik itu yang dipilih lewat pemilu maupun diangkat, mengangkat isu tertentu menjadi agenda publik.
- c. Fase *Formulasi kebijakan*, dimana didalamnya pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan.

- d. *Adopsi Kebijakan*; disini alternative kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan consensus kelembagaan.
- e. *Implementasi kebijakan*, adalah rangkaian tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai satu rangkaian kegiatan, maka dalam implementasi kegiatan satu bagian bersifat mendukung atau komplemen terhadap kegiatan yang lain. Dalam fase ini kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia.
- f. *Evaluasi kebijakan*; merupakan arena terakhir dalam proses kebijakan public. Disini performa dari pelaksana dinilai, apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, memenuhi kriteria yang ditentukan, serta dilakukan tepat waktu.

B. Teori konflik

Teori konflik muncul dari kenyataan sosial yang ada, bagi Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset bernilai. Teori konflik muncul karena reaksi dari adanya teori fungsionalisme structural, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan teori konflik ? Teori konflik adalah satu pandangan di dalam masyarakat sebagai satu system sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dimana komponen ini saling menaklukkan satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Teori konflik inilah yang menjadi akar karya Karl Marx yaitu mengenai perjuangan kelas dan Alienasi serta Materialisme. Teori Marx banyak dikembangkan oleh tokoh-tokoh sosiologi modern.

1. Lewis A. Coser

Lewis A. Coser lahir di Berlin tahun 1913, setelah perang dunia II, Coser mengajar di Universitas Chicago dan Universitas Brandeis, ia mendapatkan gelar Ph.D-nya di Universitas Columbia. Pada tahun 1975, ia terpilih menjadi Presiden *American Sociological Association* (ASA) dan memunculkan karya yang fenomenal yaitu *The Functions of Social Conflict*. Dalam karya itu berisi tentang 16 proposisi dari kutipan Georg Simmel kemudian dikembangkan menjadi penjelasan yang menarik serta Coser mengeritik proposisi Georg Simmel dengan menghubungkan perkembangan fakta dan fenomenal yang jauh sebelum Georg Simmel hidup dan tidak jarang membandingkan dengan gagasan sosiolog-sosiolog klasik, bahkan yang menarik dari teori Coser adalah sangat disiplin dalam satu tema.

Tema-tema Coser sangat Concern, baik konflik ditingkat eksternal maupun internal, Coser dapat menjelaskan secara detail baik konflik dalam maupun luar, ada upaya Coser untuk mengintegrasikan Fungsionalisme dengan konflik bahkan mengkombinasi lebih kuat ketimbang berdiri sendiri.

Dalam *Greedy Institutions* (Institusi tamak) yang berisi tentang karakter kehidupan modern yang sudah tidak memandang bulu yang terdistribusi, tersegmentasi dan terelineasi sehingga membatasi kebebasan masyarakat dan Coser tertarik dengan jaringan konflik atau kesetiaan yang terpotong yang dapat meningkatkan serta menggerakkan masyarakat untuk melakukan perjuangan hidup dan konfrontasi.

Pemikiran Coser dilatarbelakangi oleh sosiolog-sosiolog klasik yaitu Georg Simmel, Sigmund Freud, Coser mengkritisi eksposisi pengembangan yang lebih tajam dalam fragmentasinya dari Simmel dan menambahi gagasan dari psikologi Freud. Coser berpendapat bahwa konflik merupakan bagian dari masyarakat bahkan sisi kehidupan sosial yang mendasar serta konflik lebih penting untuk dijelaskan

ketimbang consensus, hal ini berkaitan dengan kritikan sosiologi Amerika yang mulai melupakan permasalahan konflik dan ramai-ramai mengembangkan fungsionalisme.

Mengapa hal ini terjadi karena konflik adalah disfungsi yang harus dihindari dan lebih tertarik pada tema terapan. Coser juga tidak lupa mengkritik gagasan dari Parsons yang mengacu pada upaya menjaga keseimbangan dan consensus daripada mengupas lebih dalam tentang konflik. Menurut Ruth Wallace dan Alison Wolf dalam *Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition*, yang mengatakan Coser adalah sosiolog yang setia atas kajian konflik dan di kaji 2 hal yang penting yaitu:

Pertama konflik dapat mengikat masyarakat secara bersama-sama. Kedua, konflik dapat menggerakkan perjuangan dan konfrontasi.

2. Gagasan-Gagasan Coser

Proposisi 1: Group Binding Functions of Conflict (Kelompok Mengikat Fungsi-fungsi Konflik), Coser yang mengkritisi gagasan George Simmel yang terletak pada adanya ketidakjelasan atau perbedaan antara rasa bermusuhan – konflik – legitimasi serta kegagalan Simmel adalah tidak membedakan antara perasaan bermusuhan dan konflik, sedangkan konflik terletak pada interaksi sosial baik dua orang atau lebih, tindakan bermusuhan adalah hal yang rentan terlibat konflik.

Proposisi 2: Kelompok memelihara Fungsi konflik dan Arti penting Lembaga katup penyelamat. Coser masih mengkritisi gagasan Simmel bahwa konflik tidak semuanya bermakna negatif dan tindakan konflik dengan rasa permusuhan tidak sama.

Proposisi 3: Realitas dan Konflik tidak Realitis, gagasan Simmel adalah konflik disebabkan benturan kepentingan pribadi serta pembatasan perjuangan sebagai alat mencapai tujuan. Sedangkan Coser membaginya dalam 3 hal yaitu

konflik Realitis, konflik tidak Realitis dan kemungkinan campuran. Lebih singkatnya penjelasan Realitis adalah konflik muncul dari frustrasi, konflik juga alat mendapatkan hasil-hasil tertentu, konflik akan berhenti jika actor menemukan lawan yang seimbang, konflik realities terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan Konflik tidak realities adalah melibatkan dua orang atau lebih dan tidak diakhiri dengan permusuhan dari lawan. Kemungkinan campuran adalah konflik non realitis merupakan perubahan dari kebencian realitis.

Proposisi 4: Permusuhan dan hubungan sosial yang erat. Dalam hal ini, Coser mengkritik Homans serta Simmel, Homans tidak melihat bahwa kesukaan akan muncul bersamaan rasa benci, gagasan simmel yang sederhana dapat dikembangkan oleh Freud sebagai ambivalensi yaitu sebuah pertunjukan perasaan antitesis (sayang & rasa benci), Coser juga menyatakan bahwa perilaku permusuhan lebih siap terjadi pada hubungan sosial yang erat,

Proposisi 5: Dampak dan fungsi konflik dalam struktur kelompok, dalam hal ini Coser menfokuskan 2 jenis konflik yaitu konflik yang jenis persoalan berbeda, dan konflik jenis struktur berbeda. Coser juga menyatakan ada 2 bentuk konflik yaitu konflik non-komunal (komunitas tidak mengikat antara kelompok pada konflik dan tidak ada hasil ketika kompromi dilakukan) dan Konflik komunal (konflik ini bersifat integratif atau didasarkan pada penerimaan umum)

Proposisi 6: Konflik dengan kelompok lain meningkatkan Kohesi internal, dalam hal ini Coser mempunyai penaksiran yang berbeda dari gagasan Simmel yaitu konflik membuat kelompok maupun individu lebih sadar tentang ikatan serta partisipasi komunitas. Gagasan Simmel bahwa konflik mengarah pada bentuk

peperangan sedangkan peperangan merupakan bentuk lain dari konflik dan kesimpulannya tidak dapat dipertahankan.

Proposisi 7: Konflik dan Ideologi Dalam proposisi Simmel, dia menanggapi dengan membedakan jenis konflik yaitu tujuan yang bersifat personal(subyektif) dan tujuan objek yang sifatnya impersonal(Obyektif). Simmel menegaskan 2 pendapat yaitu: Individu-individu masuk dalam konflik supraindividual yang bertindak sebagai wakil kelompok, kedua, individu-individu ini dikaruniakan kehormatan dan kebenaran diri ketika mereka tidak bertindak untuk alasan yang menentingkan diri sendiri.

Dalam menanggapi proposisi dari simmel, Coser sedikit mengutip dari Marx bahwa kesadaran kelompok dapat disamakan dengan kesadaran kelas yakni adanya transformasi dari setiap individu dengan keadaan hidup yang khusus untuk mewakili kesadaran kelompok. Coser mengungkapkan peran intelektual, sebab peran intelektual memiliki kepentingan dalam mengobjekkan gerakan sosial dalam mentransformasikan kelompok kepentingan dalam gerakan ideologis.

Randall Collins tentang Interaksi sosial, konflik, kekuasaan, dan distribusi sumber daya. Collins tertarik dengan tradisi konflik baik yang dimulai dari Machiavelli, Thomas Hobbes, Max Weber, Karl Marx. Menurut Machiavelli dan Thomas Hobbes, adanya keteraturan sosial karena paksaan organisasi. Dalam melihat gagasan Karl Marx, Collins telah meringkasnya yaitu dalam hal historis, adanya bentuk kepemilikan modal serta alat produksi dikuasai oleh kekuasaan Negara yang sifatnya memaksa, oleh karena itu adanya kelas-kelas dibentuk dengan pembagian kepemilikan.

Adanya sumbangan Material mempengaruhi perkembangan dimana kelas sosial mengaturnya secara efektif demi kepentingan pemilik modal dan alat-alat

produksi juga menentukan kepentingan yang dapat mengartikulasikan ide-ide untuk mendominasi dunia ideologis. Dalam hal ini, Collins tidak terpaku dengan teori konflik Marx tetapi mencoba menggabungkan dari teori-teori sosiolog lainnya yaitu Weber, Durkheim dan Goffman. Gagasan-gagasan Collins tentang konsep kekuasaan, konflik di masyarakat, sumber daya dalam konflik, konflik, stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya, organisasi sebagai arena konflik, konflik melahirkan konflik-konflik lainnya dan tipologi konflik.

Dalam hal ini Randall Collins banyak menjelaskan secara panjang lebar mengenai teori konflik yang tidak terlepas dari teori- teori klasik, seperti halnya kekuasaan ini tidak lepas dari teori Weber, Collins menyatakan bahwa dalam kekuasaan akan menimbulkan konflik, Collins tidak hanya menyoroti konteks politik tetapi lebih mikro ekonomi yang mengarah pada persoalan kerja sehari-hari akibat kepentingan ekonomi diri dan tidak harus diartikan sebagai antitesis kelas Marx.

Konflik di masyarakat dapat terjadi karena hal-hal tertentu seperti *Wealth*, *prestige*, dan *power* yang semua masyarakat atau individu ingin mengejaknya dan Collins tidak membatasi konflik sebatas penjelasan materialis saja tetapi pada gagasan-gagasan (ideas) dan cita-cita, dan sesuatu hal yang sifatnya simbolik dan solidaritas emosional ternyata menjadi senjata utama dalam konflik.

Sumber daya dalam konflik meliputi material dan sumber daya teknik seperti kepemilikan kekayaan, alat produksi, dan senjata. Sumber daya dalam konflik juga tidak terlepas dari peran dalam hubungan personal dan kemampuan negosiasi untuk mendapatkan material dalam meningkatkan status maupun menjual kemampuan cultural untuk memaksakan solidaritas emosional. Dalam hal ini Collins membagi menjadi 2 sumber daya dalam konflik yaitu *Generalized cultural capital* (seperti : pengetahuan, posisi, otoritas dan pengelompokan) dan *Particularized cultural capital*

(seperti: identitas-identitas khusus, reputasi, jaringan dan posisi pada sebuah organisasi).

Konflik kaitannya dengan stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya, Collins menjelaskan kemunculan konflik akibat stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya namun Collins lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi dengan intentitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok untuk mengorganisasikan dan memobilitasi. Konflik yang dilihat dari stratifikasi sosial adalah operasi lewat struktur dan intensitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok mengorganisasi dan memobilitasi dengan penguasaan sumber daya.

Konflik juga berkaitan dengan organisasi yang dijadikan arena konflik, menurut Collins, konflik yang terjadi di organisasi baik organisasi politik maupun organisasi kerja lebih ditekankan pada maneuver merusak ikatan organisasional dibandingkan merusak dalam artian fisik. Dalam teori konflik Collins lebih memperlihatkan konflik yang mempengaruhi solidaritas sosial, sosial ideal, sentiment moral, dan altruisme sebab distribusi dari kondisi material dan organisasi menghasilkan cita-cita dan perasaan-perasaan yang dapat mendominasi hierarki atau kelompok. Konflik juga melahirkan konflik-konflik berikutnya, konflik potensial dihidupkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki beberapa pengertian kesadaran moral.

Dalam teori konflik Collins juga membagi tipologi konflik menjadi 2 yaitu bentuk konflik yang cenderung terus dalam periode yang lebih panjang dibandingkan konflik yang hebat, bentuk selanjutnya adalah konflik yang relative ringan cenderung mengurangi kehebatan birokratisasi. Dalam hal terjadinya konflik yang hebat lebih

menekankan pada sumber daya emosi dalam waktu jangka pendek sedangkan dalam jangka panjang lebih memerlukan faktor-faktor sumber daya material.

Ralf Dahrendorf Konflik Wewenang yang mengganti konflik kelas, Sir Ralf Dahrendorf lahir di Hamburg, Jerman pada tahun 1929, sebelum mempelajari sosiologi, ia mempelajari filsafat dan sastra klasik di Hamburg dan mulai mempelajari sosiologi di London Inggris. Teori konflik Ralf Dahrendorf yang terkenal kuat menyerang perspektif fungsionalisme struktural, ia menyatakan bahwa fungsionalisme struktural adalah sosiologi utopis yang digerakan oleh Talcott Parsons yang lebih merumuskan masyarakat dengan penekanan pada nilai-nilai bersama, konsensus, integrasi sosial dan keseimbangan, dan tidak memberikan perhatian pada konflik dan perselisihan yang merupakan bagian intern dari kehidupan masyarakat, serta mustahil menggabungkan teori fungsionalisme struktural dengan konflik dan tidak mungkin disatukan.

Tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Ralf Dahrendorf adalah Karl Marx, ia mengambil gagasan dari teori, hipotesis dan konsep-konsep dari Karl Marx tetapi juga mengkritiki ramalan tentang revolusi kelas Karl Marx yang tidak terbukti. Tidak semua gagasan Karl Marx didukung maupun dikritik oleh Ralf Dahrendorf, selanjutnya ia juga mengkritiki tokoh fungsionalisme struktural yaitu Talcott Parsons terkait asumsi-asumsi yang dipegang teguh oleh teori ini, dan Ralf Dahrendorf memasukan gagasannya tentang fungsi yang menjelaskan stratifikasi sosial secara sosiologis dan didalam teori fungsionalisme struktural hanya menjembatani pemikiran stratifikasi sosial yang kurang objektif sehingga Ralf Dahrendorf menyebut teori utopia yang dikemukakan oleh Talcott Parsons.

Tokoh yang tidak kalah mempengaruhi teori konflik dari Ralf Dahrendorf adalah Max Weber mengenai gagasan kekuasaan, otoritas, dominasi dan

perundukan. Gagasan- gagasan dari teori konflik dari Ralf Dahrendorf adalah kritik terhadap perspektif fungsionalisme, dimana teori ini berasumsi bahwa struktur masyarakat sebagai sebuah system yang terintegrasi secara fungsional, dimana keseimbangan dipertahankan melalui pola-pola tertentu dan lewat proses yang berulang-ulang. Secara singkat Ralf Dahrendorf menjelaskan point-point tentang teori fungsionalisme yang dikritiki yaitu:

2. Masyarakat adalah elemen-elemen struktur yang berkembang relatif stabil.
3. Masyarakat adalah elemen-elemen struktur yang terintegrasi dengan baik
4. Setiap elemen masyarakat mempunyai fungsi yaitu menyebabkan suatu sumbangan terhadap ketahanan system.
5. setiap fungsi structural sosial didasarkan oleh consensus nilai-nilai antar anggota-anggotanya.

Kritik Dahrendorf adalah fungsionalisme masih menggunakan teori yang konservatif dan sedikit sekali menjelaskan konflik, sehingga muncul teori konflik di akhir tahun 1950 dengan kritik mengenai masyarakat yang jelas berbeda melalui pendekatan konflik yaitu:

1. Masyarakat dalam setiap waktu diatur oleh beberapa perubahan sosial yang tidak dapat dihindari.
2. masyarakat dalam setiap waktu menunjukan adanya konflik dan disensus, kedua-duanya merupakan fenomena masyarakat yang tidak dapat dihindari.
3. setiap anggota masyarakat akan memberikan adanya suatu sumbangan disintegrasi dan munculnya perubahan.
4. setiap masyarakat didasarkan atas tekanan para anggotanya oleh pihak lain.

Gagasan-gagasan penting Ralf Dahrendorf :

Dahrendorf tidak menolak bahwa didalam masyarakat terdapat consensus tetapi ia menegaskan bahwa konflik adalah structural dalam kehidupan sosial dan ini merupakan kegagalan sosiologi bahkan ilmuwan sosiologi untuk menjelaskan konflik sebagai fenomena sosial oleh karena itu Dahrendorf menekankan dialektika tentang konflik sosial yang berkaitan dengan pentingnya peran kewenangan dan kekuasaan (*power*). Ralf Dahrendorf menjelaskan perbedaan kekuasaan dan wewenang, ini terletak pada kenyataan bahwa kekuasaan pada dasarnya berhubungan dengan kepribadian individual dan wewenang berkaitan dengan posisi dan peranan sosial seseorang. Dari asumsi yang dikemukakan oleh Dahrendorf maka ia mengambil referensi modal yaitu:

- a. Pembagian wewenang dalam perserikatan adalah penyebab utama terbentuknya kelompok-kelompok yang bertentangan.
- b. Dikotomi dalam setiap perserikatan adalah penyebab terbentuknya 2 kelompok yang bertentangan.

Secara singkat Dahrendorf menjelaskan secara detail yaitu hubungan wewenang adalah selalu berbentuk hubungan antara supra dan subordinasi bersifat atas bawah, dimana dengan perintah dapat mengendalikan yang ada dibawahnya dan wewenang ini secara relative dilekatkan pada posisi sosial daripada pribadi individual serta hubungan wewenang selalu meliputi spesifikasi orang-orang yang tunduk pada pengendalian dan spesifikasi dalam bidang-bidang yang mana pengendalian itu diperbolehkan dan tidak digeneralisasikan. Wewenang adalah bentuk yang sah dari badan hukum. Dahrendorf menjelaskan perserikatan adalah Negara, gereja, perusahaan, partai politik, serikat buruh dan klub.

Dahrendorf juga menjelaskan teori konflik dengan pendekatan konsep dialektis seperti yang dikutip oleh Timasheef dan Theodorson (1979: 280) adalah :

“ modal konflik dialektis ada karena sumber konflik sosial terlihat sudah tidak terelakan, muncul dari pembagian inheren dari semua organisasi sosial kedalam 2 kategori peran yang berlawanan yaitu mereka yang memiliki otoritas dan subordinate.”

Kelompok-kelompok yang bertentangan tidak semua asosiasi menyadari kepentingannya sehingga dibagi dalam kelompok yang belum menyadari konflik yaitu kepentingan laten dan kelompok dalam suatu asosiasi yang sudah menyadari adanya konflik kepentingan yang disebut kepentingan manifes, kepentingan laten berpotensi yang ditentukan oleh seseorang dan memiliki peran tertentu hingga dapat berubah dalam bentuk kepentingan nyata atau manifest, selanjutnya kelompok yang belum menyadari kepentingannya dan menjadi sadar kepentingannya sehingga terbentuk kelompok semu dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu sebuah inti atau system nilai yang bertujuan bersama, personal, orang-orang yang mengaturnya, adanya norma tertentu, adanya peralatan material, ada kegiatan tertentu yang teratur dan fungsi objektif.

Didalam kelompok semu ini terbentuk kelompok kepentingan namun ada perbedaan antara kelompok semu dengan kelompok kepentingan yaitu kelompok manifest ini lebih pada gagasan, ide serta membuat program-program sedangkan kelompok kepentingan sudah seperti partai politik, serikat dagang dan bentuk lembaga lainnya, kelompok kepentingan ini berpotensi menjadi kelompok konflik, hal ini berhubungan dengan 3 faktor yaitu kondisi teknik organisasi yang bergantung pada pembentukan kepemimpinan dan kader dalam kelompok semu dan diperlukan bagaimana membangun ideologi dan system kepemimpinan, kondisi politis yang bergantung pada kelompok dominan untuk mengizinkan memperbolehkan berdirikan organisasi besar yang memiliki kepentingan berlawanan sehingga dapat leluasan

bergerak, dalam system Negara yang demokrasi, kelompok kepentingan makin diuntungkan tetapi dalam system Negara totaliter, sangat kecil kelompok kepentingan bergerak leluasa, selanjutnya kondisi sosial yang berkaitan dengan kesempatan anggota semu berkomunikasi dan merekrut anggota-anggota.

Dalam memahami semua gagasan Dahrendorf dapat dirangkum dalam beberapa point yaitu:

1. Semakin sedikit kondisi teknikal, sosial, dan politik dari organisasi, semakin hebat konflik yang terjadi.
2. Semakin sedikit mobilitas anyara kelompok yang memiliki otoritas, semakin hebat konflik akan terjadi.
3. Semakin sedikit kondisi tekniukal. sosial, dan politik dari organisasi, semakin hebat kekerasan akan terjadi.
4. Semakin kecil kemampuan kelompok-kelompok konflik mengembangkan kesepakatan terkait dengan pengaturan, semakin besar kekerasan akan terjadi.
5. Semakin hebat konflik, semakin akan terjadi reorganisasi dan perubahan structural.
6. Semakin banyak kekerasan ada di konflik, semakin besar tingkatan reorganisasi dan perubahan structural (*idem*,lihat juga dalam George Ritzer (terjemah), 2004 : 157).

Teori Konflik C Wright Mills (1916-1962) di Waco adalah sosiolog Amerika yang berusaha menggabungkan perspektif konflik dengan kritik terhadap keteraturan sosial, tema-tema yang diangkat oleh Mills adalah hubungan antara alienasi dan

birokrasi dan kekuasaan kaum elit. Mills mengecam kapitalisme dan birokrasi modern karena menyebabkan alienasi dalam diri pekerja atau karyawan.

Di Amerika kedudukan atau posisi penting banyak dikuasai oleh kaum elit dalam bidang militer, ekonomi, politik. Mills sepaham dengan teori Marxis dan Neo-Marxis dalam hal alienasi, efek dari struktur sosial terhadap kepribadian dan manipulasi manusia oleh media tapi yang membedakan dari tokoh-tokoh sebelumnya ia tidak melihat pemilikan pribadi sebagai sumber kejahatan di dalam masyarakat.

Teori konflik dari Jonathan Turner, dia mengemukakan 3 persoalan utama dalam teori konflik yaitu tidak ada definisi yang jelas mengenai konflik atau apa yang bukan konflik, kedua, teori konflik dilihat mengambang karena tidak menjelaskan unit analisis secara jelas, apakah itu konflik individu, kelompok, institusi, organisasi atau konflik antar bangsa. Ketiga adalah teori konflik ini merupakan reaksi dari teori fungsionalisme structural maka sulit dipisahkan dari teori tersebut.

Turner mempusatkan pada konflik sebagai suatu proses dari peristiwa-peristiwa atau fenomena yang mengarah pada interaksi yang disertai kekerasan antara 2 pihak atau lebih dan Turner juga menjelaskan konflik yang terbuka, singkatnya adalah system sosial terdiri dari unit-unit yang saling berhubungan satu sama lainnya dan didalamnya terdapat ketidak-keseimbangan atas pembagian kekuasaan dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan mulai mempertanyakan legitimasi, pertanyaan tersebut mengubah kesadaran untuk mengubah system alokasi kekuasaan.

Kesadaran dari kelompok yang tidak memiliki kekuasaan menimbulkan kemarahan dan menyebabkan semakin tegang akhirnya terjadi konflik terbuka antara kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Terkait penelitian yang akan dilakukan, peneliti disini mengambil sebuah kerangka pemikiran, dimana kerangka pemikiran disini adalah alur pikir yang dirangkum secara singkat untuk menjelaskan bagaimana perda no. 9 tahun 2009 ini dan dampaknya ke masyarakat.

Kabupaten Tana Toraja merupakan kabupaten dengan beragam budaya dan adat istiadat, oleh karenanya masyarakat Tana Toraja sering menyelenggarakan berbagai upacara adat seperti Pesta Adat Rambu Tuka dan Rambu Solo. Tingginya Tingkat permintaan masyarakat akan penyelenggaraan upacara adat, maka secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat akan hewan potong juga meningkat.

Dewan perwakilan rakyat daerah bersama pemerintah daerah mempunyai fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah (perda) untuk dijadikan pedoman dan dasar hukum penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dan penetapan peraturan daerah tersebut.

Melihat tingginya permintaan masyarakat Tana Toraja terhadap hewan potong tersebut maka pemerintah Kabupaten Tana Toraja membuat Peraturan Daerah yang tertuang dalam PERDA No. 4 Tahun 2001 tentang retribusi rumah potong hewan. Dimana masyarakat yang menyembelih hewan potong di Upacara Adat atau pesta yang berlangsung harus membayar retribusi yang telah ditentukan pemerintah.

Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 sebagai pengganti dari PERDA No. 4 Tahun 2001, dengan menaikkan harga retribusi pajak rumah potong hewan.

Setelah menaikkan harga retribusi terhadap pemotongan hewan tersebut maka masyarakat di kabupaten tana toraja semakin merasa terbebani karena nominal yang ditawarkan pemerintah juga cukup membebani yaitu sekitar naik $\pm 50\%$ dari pajak yang dikenakan sebelumnya.

Masyarakat yang terbebani ini pun mencoba mengeluarkan rasa keberatan mereka karena perda ini dengan melakukan beberapa cara dan gerakan untuk menanggapi rasa keberatan mereka terhadap pemerintah kabupaten tana toraja yang telah mengeluarkan perda ini.

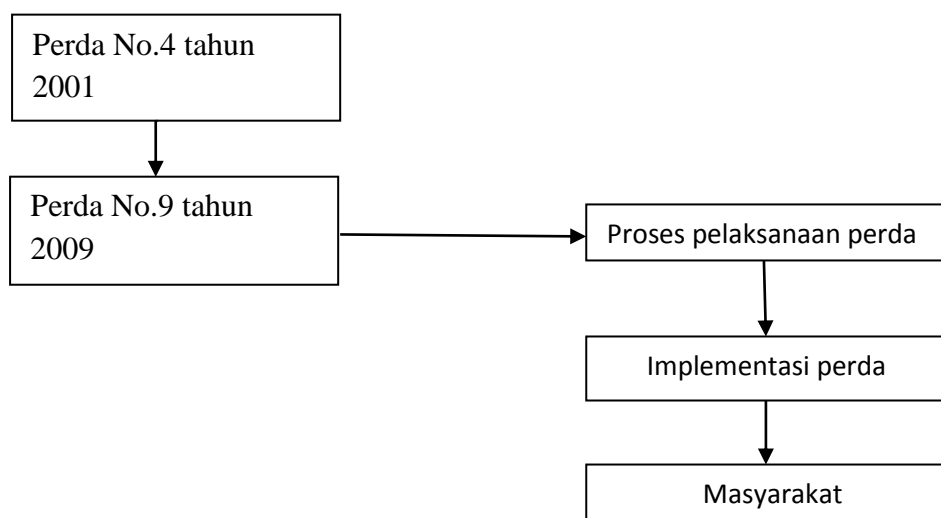
Salah satu cara yang dilakukan masyarakat tana toraja adalah dengan cara menunjukan keberatan mereka terhadap kebijakan pemerintah ini dengan melakukan aksi menolak perda ini ke dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tana toraja dan kepada pemerintah kabupaten tana toraja.

Adanya perda ini juga diperkirakan oleh karena adanya kepentingan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan konflik oleh pihak-pihak tersebut sehingga sangat berdampak sangat buruk bagi masyarakat yang harus melaksanakan perda tersebut.

Pendekatan kebijakan publik, peraturan daerah dibuat oleh kepala daerah bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah. Dimaksudkan untuk menciptakan dan mengatur keraturan dalam masyarakat. Adapun perda dibuat melalui proses legislasi. Setelah pembuatan perda tersebut maka perda tersebut akan di implementasikan di masyarakat dan harus di laksanakan oleh masyarakat. Dalam implementasinya perda tidak selalu membawa hal yang baik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa perda yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu ataupun hanya menguntungkan pemerintah itu sendiri tanpa melihat dampak yang sangat merugikan masyarakat.

Teori Konflik Kepentingan, dalam pembuatan perda tidak selamanya mengacu pada kepentingan masyarakat, ini disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengambil kesempatan, tentunya dengan memanfaatkan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengambil keuntungan pribadi kelompok itu sendiri. Hal ini lah yang menyebabkan timbulnya konflik terlebih konflik kepentingan karena besarnya keuntungan yang dapat di dapatkan dari perda ini khususnya keuntungan materi yang besar dan sangat menguntungkan.

Skema Pikir



BAB III

Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten tana toraja provinsi sulawesi selatan, hal ini dikarenakan kabupaten tana toraja merupakan area fokus penelitian dan merupakan daerah terbentuknya perda no.9 tahun 2009 ini.

B. Tipe Penelitian dan dasar penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Adapun pertimbangan untuk menggunakan metode ini karena tipe ini mampu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana fenomena tersebut dapat diketahui dan dipahami.

Penelitian diarahkan untuk mengembangkan dan menganalisis fakta mengenai perda no.9 tahun 2009 tentang rumah potong hewan di tana toraja dan implikasinya. Sedangkan, dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam.³

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tipe dan dasar penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

³Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal. 8

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yakni informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Penulis memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan-informan. Wawancara mendalam terhadap informan tersebut akan mendukung fakta mengenai implikasi perda no.9 tahun 2009 tentang rumah potong hewan terhadap acara – acara adat di toraja.

b. Data Sekunder

Dari penelitian ini data diperoleh dari studi pustaka yaitu berasal dari dokumen – dokumen grafis seperti tabel, catatan, sms, foto dan lain – lain. Penulis melakukan telaah pustaka melalui penelitian – penelitian sebelumnya dalam bentuk buku, jurnal dan artikel – artikel yang ditulis dalam media cetak dengan sumber yang jelas. Penulis juga menggunakan literatur, dokumen dan referensi dari media internet guna melengkapi data – data primer sebelumnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan merupakan pengamatan pada perancang – perancang perda yaitu Bupati, DPRD serta masyarakat. Tujuan utamanya adalah peneliti dapat memahami secara mendalam terkait kondisi lapangan dan mereka yang terlibat didalam penelitian.

b. Wawancara

Penulis memilih melakukan wawancara mendalam. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka penulis meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam,

peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

c. Dokumen/arsip/literatur kepustakaan/hasil penelitian sebelumnya

Apabila dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dokumen - dokumen berbentuk gambar dan tulisan untuk melengkapi data - data pada penelitian ini dengan melampirkan bagian foto, gambar, peraturan, kebijakan dan catatan kehidupan untuk melengkapi bukti pada penelitian sehingga dapat menunjang data primer yang telah ada.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi penulis menganalisis dengan mengumpulkan data dan kemudian dilakukan penyeleksian untuk dikelompokkan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Sosial Politik Tana Toraja

a. 1. Kondisi sosial

Wilayah Tana Toraja juga digelar Tondok Lili'na Lapongan Bulan tana Matari'allo. Wilayah ini dihuni oleh satu etnis (Etnis Toraja). Dengan jumlah penduduk kurang lebih 458.000 jiwa. Kurang lebih 650.000 jiwa yang hidup merantau dan bekerja di luar wilayah Tana Toraja. Suku Toraja juga memiliki satu bahasa lokal yaitu Bahasa Toraja. Namun untuk pergaulan secara umum mereka menggunakan Bahasa Indonesia; di samping itu sebagian juga dapat berbahasa

Inggris, Belanda, Jerman, Jepang dan Mandarin. Mereka yang masuk kategori ini adalah putra-putra Toraja yang bertugas sebagai guide-guide untuk tourist.

Sampai saat ini budaya luar tidak cukup kuat mempengaruhi cara hidup sehari-hari orang Toraja yang begitu ramah, hidup rukun, damai dan harmonis serta dengan tangan terbuka menyapa tamu-tamunya untuk datang menyatu di dalam pesta-pesta adat Toraja baik pesta Rambu Tuka maupun pesta Rambu Solo.

a. 2. Sistem politik Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang dikenal di Toraja waktu dulu adalah sistem federasi. Daerah Toraja dibagi menjadi 5(lima) daerah yang terdiri atas :

1. Makale
2. Sangala
3. Rantepao
4. Mengkendek
5. Toraja Barat.

Daerah-daerah Makale, Mengkendek, dan Sangala dipimpin masing-masing oleh seorang bangsawan yang bernama Puang. Daerah Rantepao dipimpin bangsawan yang bernama Parengi, sedangkan daerah Toraja Barat dipimpin bangsawan bernama Madika.

Didalam menentukan lapisan sosial yang terdapat didalam masyarakat ada semacam perbedaan yang sangat menyolok antara daerah yang dipimpin oleh

Puang dengan daerah yg dipimpin oleh Parengi dan Madika. Pada daerah yang dipimpin oleh Puang masyarakat biasa tidak akan dapat menjadi Puang,. sedangkan pada daerah Rantepao dan Toraja Barat masyarakat biasa bisa saja mencapai kedudukan Parengi atau Madika kalau dia pandai. Hal inilah mungkin yang menyebabkan daerah Rantepao bisa berkembang lebih cepat dibandingkan perkembangan yang terjadi di Makale.

B. Kondisi wilayah Kabupaten Tanah Toraja

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota Makale, secara geografis terletak di bagian utara Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan yaitu, antara 2° Lintang Utara - 3° Lintang Selatan dan 119° Bujur Timur -120° Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2054,30 km. Dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
- Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu.
- Sebelah Barat adalah Propinsi Sulawesi Barat. 56 Secara administratif,

Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamatan, 112 Lembang, dan 47 Kelurahan. Pembagian wilayah kecamatan, jumlah lembang serta kelurahan serta luas kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2010

No.	Kecamatan	Jumlah lembang	Jumlah kelurahan	Luas (km)	Presentase terhadap luas kabupaten (%)
1	Bonggakaradeng	5	1	206,76	10,06
2	Simbuang	5	1	194,82	9,48
3	Rano	5	-	89,43	4,35
4	Mappak	5	1	166,02	8,08
5	Mengkendek	13	4	196,74	9,58
6	Gandang Batu Sillanan	9	3	108,63	5,29
7	Sangalla	3	2	36,24	1,76
8	Sangalla Selatan	4	1	47,80	2,33
9	Sangalla Utara	4	2	27,96	1,36
10	Makale	1	14	39,75	1,93
11	Makale Selatan	4	4	61,70	3,00
12	Makale Utara	-	5	26,08	1,27
13	Saluputti	8	1	87,54	4,26
14	Bittuang	14	1	163,27	7,95
15	Rembon	11	2	134,47	6,55
16	Masanda	8	-	134,47	6,56
17	Malimbong Balepe	5	1	211,47	10,29
18	Rantetayo	3	3	60,35	2,94
19	Kurra	5	1	60,50	2,94
20	Jumlah	112	47	2054,30	100,00

Sumber. BPS Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2012

Kondisi Topografi Tana Toraja terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan dan lembah dengan ketinggian antara 150 m – 3083 m di atas permukaan laut dengan rincian sebagai berikut :

- 18.425 Ha(5,80%) pada ketinggian 150 – 500 m.
- 143.314 Ha (44,70%) pada ketinggian 501 – 1000 m.
- 118.330 Ha (36,90%) pada ketinggian 1000 – 2000 m.
- 40.508 Ha (12,60%) pada ketinggian lebih 2000 m.

Ibu kota Kabupaten Tana Toraja terletak sekitar 329 km ke arah utara kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

C. Kependudukan Tana Toraja

Kabupaten Tana Toraja dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Makale merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 89,38 jiwa/Ha. Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 8.504 KK, dengan jumlah penduduk 34.305 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Makale tercatat 3.975 Ha (1,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja) dengan luas area terbangun 384 Ha yang meliputi 1 lembang dan 14 kelurahan. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Tana Toraja khususnya lima tahun terakhir (tahun 2008-2012) menunjukkan angka 0,85% pertahun. Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2018 diprediksikan penduduk Kabupaten Tana Toraja mencapai 236.555 jiwa dengan kepadatan penduduk 80,02 jiwa/Ha. Berikut tabel jumlah penduduk kabupaten tana toraja.

Kepadatan Penduduk Tana Toraja tahun per 2013

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk (orang)	Kepadatan penduduk (Orang/Km2)	Laju pertumbuhan 2010-2013(%)
1	Bonggakaradeng	7021	34	1,25
2	Simbuang	6309	32	1,23
3	Rano	6182	69	0,78
4	Mappak	5696	34	0,65
5	Mengkendek	27756	141	0,67
6	Gandang Batu Sillanan	19686	181	0,78
7	Sanggalla	6759	187	0,8
8	Sanggalla Selatan	7533	158	0,78
9	Sanggalla Utara	7498	268	0,79
10	Makale	34415	866	0,67
11	Makale Selatan	12703	206	0,83
12	Makale Utara	12014	461	0,71
13	Saluputti	7596	87	0,7
14	Bittuang	14736	90	0,57
15	Rembon	18501	138	0,76
16	Masanda	6428	48	1,32
14	Malimbung Belepe	9130	43	0,76
15	Rantetayo	10987	182	1,12
16	Kurra	5267	87	0,81
17	Tana toraja	226212	110	0,77

Dari tabel diatas dapat di lihat bagaimana kepadatan penduduk Tana Toraja tiap kecamatan, dimana kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Tana Toraja yakni 226212 jiwa. Dan kepadatan penduduk paling rendah adalah 5267 jiwa

D. Peraturan daerah No.9 tahun 2009

***Lihat Lampiran**

BAB V

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan

Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah .

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁴

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun hasil temuan di lapangan yang telah penulis dapatkan selama melakukan penelitian, terkait dengan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

F. Perda no.9 tahun 2009

Berbicara tentang peraturan daerah no.9 tahun 2009 ini, perda ini berbunyi tentang kenaikan harga retribusi rumah potong hewan dimana setiap masyarakat tana toraja wajib membayar pajak yang telah ditentukan dalam undang-undang sebelumnya yaitu pada peraturan daerah No.4 tahun 2001 yang berbunyi tentang retribusi rumah potong hewan.

⁴<http://gumilar69.blogspot.co.id/2013/10/makalah-pembentukan-perda-peraturan.html>

Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*Public Policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan – tujuan, nilai – nilai, dan praktik – praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*). Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program – program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai – nilai”, dan “praktik”. Dalam perumusan perda rumah potong hewan di tanah toraja tidak terlepas dari tujuan, nilai – nilai yang berkembang disana seperti data yang penulis temukan berikut.

Adat bagi masyarakat tana toraja adalah hal yang sangat melekat dengan kehidupan mereka bahkan di kehidupan sehari-hari mereka, bahkan tidak sedikit masyarakat tana toraja yang masih menganut kepercayaan menurut adat yang mereka jalankan, kepercayaan ini biasa disebut dengan agama aluk.

Di tana toraja dalam upacara kematian ataupun upacara syukur atau masyarakat tana toraja biasa menyebut dengan sebutan upacara rambu solo buat upacara kematian dan rambu tuka buat upacara syukuran. Bagi masyarakat tana toraja melakukan pesta dalam setiap moment adalah hal yang harus dilakukan karena bagi masyarakat tana toraja dengan mengadakan pesta atau syukuran sama saja dengan melaksanakan kewajiban adat mereka.

Dalam mengadakan upacara *rambu solo* dan *rambu tuka* selalu di ikuti dengan kegiatan pemotongan hewan dimana kegiatan ini di lakukan sebagai salah satu rangkaian acara yang wajib di lakukan. Bagi masyarakat setempat dengan melakukan pemotongan hewan berarti mereka telah melaksanakan

kewajiban adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka dan juga sebagai rasa ungkapan terimakasih mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seperti hasil wawancara berikut:

“itu pemotongan hewan dek sebenarnya dilakukan karena kebiasaan. kalau bikin ki pesta masyarakat tidak bisa itu bikin pesta kalau tidak potong tedong atau babi, karena bikin malu-malu itu keluarga kalau pesta baru tidak potong tedong atau babi, lebih baik itu jangan bikin pesta kalau tidak potong hewan”

Dengan alasan tuntutan adat atau pun demi kehormatan nama baik keluarga maka masyarakat di tana toraja selalu mengusahakan apapun agar dalam setiap upacara adat yang mereka lakukan harus disertai dengan pemotong hewan. Tingginya permintaan masyarakat tana toraja akan hewan potong inilah maka pemerintah berinisiatif membuat perda no. 9 tahun 2009 ini.

Menurut pemerintah kabupaten tana toraja sendiri perda no.9 tahun 2009 ini di buat dengan tujuan sebagai jasa pelayanan oleh pemerintah daerah sekaligus bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kabupaten tana toraja dan agar pertumbuhan ekonomi, inflasi serta tingkat pendapatan masyarakat menjadi lebih stabil. Seperti yang di katakan sendiri oleh bupati kabupaten tana toraja melalui wawancara dengan penulis, seperti berikut :

“Perda no. 9 tahun 2009 merupakan perda penyesuaian dari perda no. 4 tahun 2001 dimana perda ini berbunyi kenaikan harga retribusi dengan tujuan untuk jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk bagi masyarakat di tana toraja ini dan juga agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, inflasi serta tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik.”

Seperti yang telah di ungkapkan langsung oleh bapak bupati tana toraja melalui wawancara dengan penulis tentang perda ini maka dapat

disimpulkan bahwa perda no.9 tahun 2009 berbunyi tentang kenaikan harga retribusi di mana sebelumnya telah dikeluarkan perda yang sama tetapi dengan bunyi yang berbeda dimana perda sebelumnya yaitu perda no. 4 tahun 2001 berbunyi tentang pajak retribusi rumah potong hewan dan pada tahun 2009 dikeluarkan lagi penyesuaian perdanya melalui pertimbangan pemerintah kabupaten tana toraja dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tana toraja yaitu kenaikan harga retribusinya.

G. Pihak yang terlibat dalam pembuatan perda

Seperti yang kita ketahui, peraturan daerah di buat oleh persetujuan dari pihak pemerintah daerah dan juga Dewan perwakilan rakyat daerah, baik itu peraturan yang di buat adalah usulan oleh pemerintah daerah maupun usul oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Peraturan daerah yang dibuat pun haruslah untuk kepentingan rakyat atau pun demi kemajuan dan pembangunan daerah.

Setiap peraturan daerah yang di buat dan telah di setuju oleh pemerintah dan oleh dewan perwakilan rakyat daerah wajib hukumnya untuk di jalankan oleh masyarakat ataupun golongan kemana perda tersebut mengacu, tidak bisa di pungkiri pemerintah akan dengan tegas memberikan sanksi kepada masyarakat ataupun golongan yang tidak menjalankan peraturan yang di buat dengan baik.

Sama hal nya dengan perda no. 9 tahun 2009 ini. Dengan melihat kondisi masyarakat dan kondisi di daerah tana toraja, pemerintah kabupaten tana toraja berinisiatif untuk membuat perda no. 9 tahun 2009 ini.

Menurut pemerintah kabupaten tana toraja, perda yang merupakan perda penyesuaian dari perda sebelumnya ini di buat dengan pertimbangan

pemerintah yang melihat bahwa perlunya di perbaharui perda sebelumnya dimana pemerintah menganggap bahwa perda sebelumnya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi tingkat pembangunan terlebih pembangunan ekonomi di kabupaten tana toraja itu sendiri.

Rancangan pembuatan perda ini semakin kuat di buat oleh pemerintah kabupaten tana toraja, dimana disini pemerintah sendiri yang langsung berinisiatif untuk menyesuaikan perda no. 4 tahun 2001 dengan mengubahnya menjadi perda no.9 tahun 2009 yang dimana perubahan perda ini mengacu pada perubahan harga retribusi dengan menaikkan harga retribusi nya.

Dengan melihat penjelasan diatas maka bisa di katakan bahwa perda ini adalah murni usulan pemerintah kabupaten tana toraja sendiri, dimana disini pak bupati langsung yang mengusulkan dan menyampaikan usulannya ini kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dengan maksud pemerintah untuk memberikan legitimasi untuk peraturan daerah. Seperti yang dikatakan langsung oleh pak bupati seperti berikut :

“perda no. 9 tahun 2009 ini murni inisiatif dari pemerintah daerah, yah dengan pertimbangan-pertimbangan setelah mengamati kondisi masyarakat sekitar dan juga melihat pembangunan daerah akhirnya kami memutuskan untuk merancangka perda ini dan memberitahu kan maksud kami ini kepada dewan perwakilan rakyat daerah”

H. Pihak yang diuntungkan atas pembuatan perda

Peraturan daerah dibuat sejatinya untuk kepentingan rakyat atau demi kepentingan daerah. Setiap peraturan daerah yang dibuat pun harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah di pikirkan dulu, apakah perda ini betul bermanfaat bagi rakyat atau justru sebaliknya, karena tidak bisa di

pungkiri lagi ada beberapa perda yang sudah tidak sebagaimana seharusnya, ada beberapa peraturan daerah yang di buat hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok atau kepentingan golongan tertentu saja.

Collins membagi menjadi 2 sumber daya dalam konflik yaitu *Generalized cultural capital* (seperti : pengetahuan, posisi, otoritas dan pengelompokan) dan *Particularized cultural capital* (seperti: identitas-identitas khusus, reputasi, jaringan dan posisi pada sebuah organisasi).

Konflik kaitannya dengan stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya, Collins menjelaskan kemunculan konflik akibat stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya namun Collins lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi dengan intentitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok untuk mengorganisasikan dan memobilitasi. Konflik yang dilihat dari stratifikasi sosial adalah operasi lewat struktur dan intensitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok mengorganisasi dan memobilitasi dengan penguasaan sumber daya.

Pada proses pembuatan perda biasanya yang paling sering terlibat adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, baik itu perda yang di usulkan oleh perwakilan rakyat daerah dan setelah itu mengajukan nya ke pemerintah daerah untuk di pertimbangkan oleh pemerintah atau pun inisiatif pemerintah yang juga setelah nya meminta persetujuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah. Setelah keduanya sepakat untuk di ajukannya perda barulah perda tersebut di sah kan.

Peraturan daerah itu sendiri bermacam-macam ada yang di bersifat aturan-aturan yang harus di taati, ada yang bersifat sanksi-sanksi jika

melanggar aturan-aturan didalam masyarakat dan ada juga yang bersifat pajak. Peraturan daerah yang bersifat pajak biasanya selalu berhubungan dengan sejumlah uang yang harus di keluarkan masyarakat ataupun kelompok-kelompok untuk memenuhi sesuatu yang ingin di lakukan, dimana jikalau tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi ataupun tidak di izinkan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang ingin di lakukan oleh masyarakat ataupun kelompok yang bersangkutan.

Peraturan daerah yang berbentuk pajak dimana pemerintah memungut sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat dalam aturan yang sebenarnya uang ini di peruntukkan untuk kepentingan daerah ataupun kepentingan umum. Kepentingan umum disini adalah hal yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan-pembangunan seperti pembangunan daerah, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur daerah dan lain sebagainya.

Diluar dari pada itu atau selain demi kepentingan daerah ataupun kepentingan masyarakat umum uang dari hasil pajak tidak di perkenankan, dimana disini pemerintah lah yang bertanggung jawab penuh terhadap uang pajak yang telah dibayar oleh masyarakat.

Adanya kemajuan di daerah merupakan cermin dari berhasilnya pemerintah mengelolah hasil dari pajak yang di bayar oleh masyarakat, sebaliknya tertinggal nya suatu daerah atau bahkan kemunduran yang dialami suatu daerah menggambarkan ketidakberhasilan pemerintah dalam mengatur daerahnya itu sendiri, terlebih jika masyarakat sudah melakukan kewajiban mereka dengan baik, masyarakat seperti tidak mendapatkan hak

yang seharusnya mereka terima dari hasil kewajiban yang mereka telah lakukan, seperti contoh membayar pajak tadi.

Ketidak berhasilan pemerintah dalam membangun daerah inilah yang menyebabkan timbulnya kecurigaan-kecurigaan yang di tujukan kepada pemerintah, kecurigaan-kecurigaan yang timbul yang membuat masyarakat bertanya-tanya dikemanakan hasil pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Bisa jadi peraturan daerah dijadikan alat untuk mengambil keuntungan bagi golongan-golongan tertentu. Seperti hal nya perda no. 9 tahun 2009 ini dimana masyarakat di perintahkan membayar pajak sebelum melakukan kegiatan adat mereka yaitu sebelum melakukan pembayaran kepada pemerintah setempat sebelum melakukan pemotongan hewan yang merupakan kegiatan adat mereka.

Jika di lihat selama ini pembayaran pajak retribusi rumah potong hewan yang di bayar oleh masyarakat tana toraja sebelum melakukan pemotongan hewan sepenuhnya diperuntuk kan oleh pemerintah kabupaten tana toraja itu sendiri, seperti yang dikatakan sendiri oleh bapak bupati tana toraja bahwa seluruh pajak yang di masyarakat langsung ke pihak pemerintah :

“sesuai dengan isi perda ini dimana masyarakat harus membayar pajak retribusi untuk hewan potong yang akan mereka sembelih dan semua hasil dari pajak retribusi ini akan langsung masuk di pendapatan asli daerah”

Begitulah sekiranya yang di katakan oleh pemerintah kabupaten toraja yang disini intinya semua hasil pajak retribusi yang dibayar oleh masyarakat mengalir langsung ke pendapatan asli kabupaten tana toraja itu sendiri.

Namun setelah penulis mencoba melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa tokoh-tokoh adat, dimana disini toko adat ini adalah dia yang bertugas dalam setiap upacara untuk mengatur jalannya upacara adat atau yang mengetahui setiap detail bagaimana pesta adat di toraja harusnya dijalankan sesuai dengan hukum adat dan juga hukum pemerintah.

Menurut tokoh-tokoh adat ada 3 unsur yang berperan dalam setiap perayaan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat tana toraja, yang dimaksudkan dengan ketiga unsur ini adalah bagian yang harus terlibat langsung jika ada perayaan adat yang dijalankan oleh masyarakat kabupaten tana toraja. 3 unsur ini merupakan bagian-bagian yang penting dalam menjalankan prosesi adat di kabupaten tana toraja, ini karena ketiga unsur ini sangat berkaitan dengan adat itu sendiri dan juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di tana toraja. Selain saling berkaitan kata kepala adat di tana toraja ketiga unsur ini saling mendorong sifatnya, saling mendorong disini maksudnya adalah ketiga unsur ini sangat penting sifatnya dalam setiap upacara adat di kabupaten tana toraja.

Ketiga unsur yang dimaksudkan disini adalah pihak-pihak yang berperan dalam upacara adat di kabupaten tana toraja. Ketiga unsur ialah pemerintah, gereja, dan pemuka adat. Pemerintah disini bertanggung jawab atas aturan-aturan hukum yang berlaku pada saat upacara adat berlangsung, seperti pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, sedangkan gereja disini berperan sebagai landasan masyarakat dalam melaksanakan upacara adat itu sendiri, dan pemuka adat orang yang mengendalikan setiap upacara adat yang dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemuka adat yang telah diwawancarai oleh penulis seperti berikut :

“dalam upacara adat yang dilangsungkan di tana toraja ada 3 unsur yang sangat berperan penting dalam setiap upacara adat disini, yaitu pemerintah, gereja, dan pemuka adat. Yah 3 unsur ini sudah pasti harus ada kalo bikin pesta di sini karena 3 unsur ini itu adalah bagian yang terdekat dan terpenting dalam masyarakat disini, tidak bisa di pisahkan masyarakat sama ini 3 bagian. Contoh nya gereja, sebagai umat yang memiliki keyakinan dan sebagian masyarakat disini itu beragama kristen maka menurut masyarakat disini sangatlah penting jika ketika mereka melakukan pesta adat di ikut sertakan gereja.

Tidak hanya terlibat dalam upacara adat saja, ternyata ketiga unsur disini juga mendapat keuntungan dalam setiap upacara adat yang dilaksanakan. Selain pemerintah yang menerima sejumlah uang dari hasil pajak yang di pungut dari masyarakat, ternyata disini gereja juga mendapat keuntungan berupa sejumlah uang dari hewan potong yang di potong oleh masyarakat tana toraja. Begitu juga pemuka adat yang mendapat bayaran ketika memimpin jalannya upacara.

Hal ini di ungkapkan sendiri oleh pemuka adat di kabupaten tana toraja yang berkata seperti berikut :

“gereja,pemerintah dan adat sangat berperan penting disini. Yah mungkin karena inilah mengapa masing-masing juga diuntungkan dalam upacara adat. Contoh nya gereja, gereja itu kalo bikin pesta orang pasti ada juga dapat bagian, jadi masyarakat yang bawa babi atau tedong untuk di potong harus bayar Rp.35.000 sama gereja atau kalo nda mau bayar pake uang bisa juga di bayar pake daging babi atau daging tedong tapi harus bagian pahanya daging yang di kasi untuk gereja ”.

Dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala adat diatas bisa dikatakan bahwa disini dalam perayaan upacara adat di kabupaten tana toraja ketiga unsur yang berperan penting dalam upacara adat masing-masing

memiliki keuntungan yang di dapat. Dalam hal ini pemerintah yang mendapat keuntungan yang di dapat dari pajak yang di atur dalam peraturan daerah, pihak gereja yang juga mendapat keuntungan dari pembagian hasil dari hewan potong dan pemuka adat yang di bayar oleh masyarakat.

I. Pengimplementasian perda dalam masyarakat.

Implementasi merupakan tugas yang memakan sumber daya/*resources* paling besar, maka tugas implementasi kebijakan juga sepatutnya mendapatkan perhatian lebih. Terkadang dalam praktik proses kebijakan publik, terdapat pandangan bahwa implementasi akan bisa berjalan secara otomatis setelah formulasi kebijakan berhasil dilakukan. Nugroho (2008: 484) menyatakan *implementation myopia* yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah “Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan dengan sendirinya”. Terkadang sumber daya sebagian besar dihabiskan untuk membuat perencanaan padahal justru tahap implementasi kebijakan yang seharusnya memakan sumber daya paling besar, bukan sebaliknya.

Pada dasar nya semua peraturan daerah yang di buat adalah untuk kepentingan masyarakat ataupun untuk kepentingan daerah. Namun terkadang peraturan daerah malah terlihat berdampak buruk dan terkesan merugikan masyarakat.

Perda no. 9 tahun 2009 merupakan perda yang mengharuskan masyarakat membayar sejumlah uang atas pajak yang di kenakan karena memotong hewan yang di gunakan dalam perayaan adat di kabupaten tana toraja. Pajak yang dikenakan pun bisa di bilang tidak sedikit, menurut masyarakat tarif yang di kenakan pemerintah kepada masyarakat cukup

membebani mereka. Masyarakat yang diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka berkata seperti ini :

“kami harus bayar di pos kalau bawa babi atau tedong masuk ke pesta kalau tidak yah kami tidak di perbolehkan masuk membawa hewan yang kami bawa, baru lumayan mahal juga yang di bayar. Dulu pernah agak murah ji tapi tidak tau ini kenapa naik lagi tapi yah mau di apa daripada nda ikut ki pesta,bikin malu-malu keluarga”.

Masyarakat yang terbebani dengan adanya pajak ini merasa bahwa pajak ini terlalu mahal, bagaimana tidak masyarakat yang merasa sudah cukup banyak mengeluarkan uang untuk membeli hewan potong yang ingin mereka bawa ke upacara adat masih harus diharuskan membayar yang terbilang mahal ini. Lagi pula agak tidak etis jika salah satu upacara adat rambu solo dimana disini adalah prosesi kedukaan malah masyarakat masih harus terbebani dengan harus bayar pajak, kesannya kurang begitu etis karena dilihat bahwa yang masyarakat yang melangsungkan upacara rambu solo sedang dalam keadaan berduka dan sudah begitu besar dana yang mereka keluarkan untuk mengadakan upacara rambu solo tersebut.

Mahalnya pajak rumah potong ini juga di benar kan oleh pemuka adat di kabupaten tana toraja. Malah menurut pemuka adat di kabupaten tana toraja mengatakan bahwa pajak yang di kenakan pada masyarakat tidak merata, dimana di sini pajak yang dikenakan pada masyarakat sudah tidak sesuai dengan isi perda lagi. Ada beberapa daerah yang justru menambah nominal yang harus di bayar masyarakat.

Hal ini merupakan hal yang ganjil bahkan bisa dibilang suatu pelanggaran. Peraturan yang seharusnya ditaati oleh seluruh kalangan karena merupakan peraturan langsung yang di buat oleh pemerintah setempat justru di salah gunakan oleh beberapa pihak.

Seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemuka adat, penulis mendapat kan informasi seperti pernyataan di atas. Beginilah sekiranya ungkapan pemuka adat yang telah di wawancarai :

“pajak di tiap daerah berbeda, tidak semuanya sama, katanya sih ada kebijakan lagi yang dikeluarkan oleh kepala-kepala desa begitu untuk tiap lingkungannya.ada yang sampai harus membayar sampai Rp.150.000 untuk setiap tedong yang di potong padahalkan yang dari pemerintah cuma Rp.100.000. tidak ku tau juga 50 ribu nya untuk apa hahaha tapi kan itu masyarakat itu yang penting ma’ potong karena orang toraja itu kalo persoalan potong memotong tidak ada di bilang nda ada uang nya pasti selalu ada biarpun di belakang menegelah juga ji”.

Masyarakat tana toraja betul-betul sangat di bingungkan oleh adanya pajak pemotongan hewan ini. Walaupun masyarakat tetap saja terus membayar pajak ini tapi mereka tidak pernah betul-betul mengerti mengapa mereka harus membayar pajak yang begitu mahal untuk setiap upacara adat yang mereka laksanakan. Belum lagi pajak yang harus di bebaskan kepada mereka yang katanya kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala desa atau kepala suku di daerah mereka yang menambah nominal jumlah pajak masyarakat.

Belum di ketahui pasti juga apakah pajak tambahan yang dibebankan kepada masyarakat oleh kepala desa atau kepala suku ini diketahui pemerintah atau ada izin dari pemerintah. Namun jikalau hal ini sama sekali tidak di ketahui oleh pemerintah setempat atau bahkan tidak ada izin dari pemerintah, ini artinya hal ini merupakan pelanggaran yang harus di tindak lanjuti.

Pemerintah kabupaten tana toraja sendiri dalam menyikapi perda ini mempunyai anggapan sendiri. Menurut pemerintah perda no. 9 tahun 2009 ini

sudah tidak lagi ada masalah dalam pengimplementasiannya, pasalnya menurut pemerintah perda ini sudah di terima baik oleh masyarakat terlebih lagi pemerintah menyatakan bahwa sebelum perda ini di tetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah pemerintah telah melakukan uji publik. Mekanisme uji publik dilakukan oleh pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perda ini dan kemudian setelah pemerintah merasa cukup dan merasa masyarakat sudah mengerti dan paham maka setelah itu perda ini di tetapkan.

J. Tanggapan masyarakat terhadap perda

Pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah bisa di bilang sangat minim. Oleh karena inilah setiap peraturan daerah yang di tujukan kepada masyarakat, masyarakat terima begitu saja, meskipun mereka tetap saja mengeluh karena masyarakat sendiri merasa mereka punya kepentingan di dalamnya.

Perda no.9 tahun 2009 ini contohnya. Meskipun didalam perda ini masyarakat di harus kan membayar pajak potong hewan dengan nominal yang di bilang cukup mahal namun mau tidak mau masyarakat tana toraja harus menjalankan nya, yah mau di apa lagi jika tidak maka mereka tidak bisa menjalankan upacara adat mereka. Sekiranya begitu lah yang dikatakan oleh beberapa warga masyarakat tana toraja yang telah di wawancarai oleh penulis. Mereka mengungkapkan :

“yah mau di apa kalo di suruh ki membayar yah membayar ki daripada di larang ki memotong, mau mahal juga yah di ikuti saja selama masi bisa di bayar”.

Masyarakat sendiri terdiri dari beberapa golongan. Ada yang golongan berpendidikan dan ada yang tidak. Disini penulis mencoba wawancara dan membandingkan pendapat dari golongan masyarakat yang berbeda. Dan setelah melakukan wawancara dengan kedua golongan yang berbeda tersebut penulis mendapat kan jawaban yang bisa di bilang sangat berbeda. Jika masyarakat dengan pendidikan yang rendah mengungkapkan pendapat dan pernyataan mereka seperti diatas dengan jawaban yang terkesan pasrah-pasrah saja, maka lain hal nya ketika golongan dari masyarakat berpendidikan atau bisa di bilang akademisi ini mengeluarkan pendapat mereka.

Masyarakat dengan pendidikan tinggi mempunyai pendapat yang lain juga. Mereka berpendapat bahwa perda ini memang sangat di beratkan kepada masyarakat. Mereka berkata seperti ini :

“kalau mau dilihat memang perda ini menitikberatkan ke masyarakat. Bagaimana tidak, beban pajak yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat ini sangat mahal. Beban yang harus di tanggung masyarakat pada saat melakukan pemotongan hewan sangat membebani masyarakat. Kasihan masyarakat karena hanya pentingnya potong hewan maka mereka tetap mau nda mau harus membayar. Kalo menurut saya sih boleh saja lah pemerintah memberikan pajak potong hewan ini tapi tidak dengan nominal pajak yang mahal, lagipula dengan pajak yang semahal itu yang kata pemerintah dananya langsung mengarah ke PAD toh tidak ada hasil yang signifikan yang dilakukan pemerintah. Daerah tana toraja yah liat saja begini2 saja, tidak ada perkembangan yang terlalu mencolok. Kita sih realistis saja”.

Kurang berkembangnya kabupaten tana toraja di anggap beberapa masyarakat sebagai tidak jelasnya dana PAD. Pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa semua hasil pajak langsung di masukkan ke PAD

nampaknya kurang begitu di sepakati oleh beberapa golongan. Ini disebabkan oleh daerah tana toraja yang bisa di bilang sangat minim dalam hal perkembangan. Dengan pajak yang cukup mahal yang di bebaskan pemerintah kepada masyarakat membuat masyarakat mengharapkan hal yang setimpal yang dapat dilihat oleh masyarakat di daerah tana toraja ini.

Pajak mahal yang harus di bayar oleh masyarakat tidak membuat beberapa kelompok tertentu diam begitu saja. Beberapa kelompok tertentu di masyarakat ada yang mengatakan bahwa mereka pernah melakukan aksi protes kepada pemerintah tentang pajak ini. Mereka mengatakan pernah melakukan aksi protes yang ditujukan kepada pemerintah. Aksi protes datang dari beberapa kelompok masyarakat yang merasa adanya keganjilan terhadap perda ini, yang mengaggap bahwa perda ini sangat memberatkan masyarakat dan menurut mereka adanya pihak tertentu dalam pembuatan perda ini. Aksi protes kelompok masyarakat tertentu ini berupa gerakan mengumpulkan beberapa masyarakat dan mendatangi kantor bupati untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap perda ini, tetapi aksi protes mereka tidak di hiraukan oleh pihak pemerintah. Tidak hanya disitu saja, aksi protes masyarakat ini tidak ada kelanjutannya sama sekali.

Tidak adanya kelanjutan atas aksi protes yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat ini bukan hanya disebabkan oleh tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintah, namun karena tuntutan adat yang mau tidak mau harus dijalani oleh masyarakat.

Keharusan masyarakat untuk melaksanakan upacara adat membuat pemerintah kuat untuk mempertahankan perda ini tanpa menghiraukan aksi

protes dari masyarakat. Pernyataan ini di katakan oleh salah satu masyarakat yang terlibat aksi protes, dia mengatakan seperti berikut :

“kami pernah itu pergi protes di kantor bupati tapi tidak ada hasilnya.pemerintah hanya iya iya saja nah bilang tidak ada hasil dari protes yang kita bikin. Bagaimanakah susah juga karena masyarakat tidak mendukung, kita disini pergi protes nah masyarakat lain malah mau-mau saja bayar itu pajak nah kalo begini serba salah mi kan di rasa jadi biar bang mi begitu saja karena susah adat di sin kuat sekali, pajak yang mahalpun tidak bisa menghalangi”.

Kelompok masyarakat yang melakukan aksi protes merasa aksi yang mereka lakukan sia-sia karena sampai sekarang ini aksi yang pernah mereka lakukan sama sekali tidak berdampak di masyarakat. Kelompok masyarakat ini juga pernah mencoba melakukan penawaran kepada pemerintah dengan menawarkan agar pajak bukan dikenakan perhewan yang dipotong melainkan pajak setiap upacara adat yang dilaksanakan. Tetapi lagi-lagi pemerintah tidak sepakat dan tetap membuat perda yang mewajibkan masyarakat membayar pajak dengan hitungan perhewan yang dipotong pada setiap upacara adat yang dilaksanakan.

Hal ini betul-betul sangat membuat masyarakat menyerah. Dengan lagi-lagi adat yang begitu sangat penting di masyarakat tana toraja mereka harus rela membayar pajak yang sangat membebani mereka karena nominal yang begitu mahal yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

BAB VI

Penutup

Sebagai bahan penutup dari skripsi ini ada dua poin yang diuraikan, diantaranya adalah kesimpulan dari apa yang telah di dapatkan selama penelitian sampai pada terselesaikannya skripsi ini dan yang kedua adalah saran, dimana saran disini mencakup masukan-masukan, baik dari fakta yang didapatkan dilapangan maupun hal-hal yang belum sempat terlaksana didalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Peraturan daerah no.9 tahun 2009 tentang retribusi rumah potong hewan di kabupaten tana toraja merupakan peraturan daerah yang melanjutkan perda no. 4 tahun 2001. Isi dari perda ini adalah dimana masyarakat tana toraja diwajibkan membayar pajak setiap melakukan pemotongan hewan di setiap upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat tana toraja.

Peraturan daerah ini di nilai sangat memberatkan masyarakat karena nominal pajak yang harus dibayar masyarakat sangatlah mahal. Oleh karena mahalnya pajak yang harus dibayar masyarakat menjadi masalah besar. Adanya kecurigaan-kecurigaan yang timbul apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan kan dengan adanya perda ini atau kah adanya konflik kepentingan yang terjadi dengan adanya perda ini menjadi salah satu pertimbangan akibat di sahkannya perda ini.

Adanya aksi penolakan oleh beberapa kelompok masyarakat juga menambah masalah dengan adanya perda ini, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang merasa pengimplementasian perda no.9 tahun 2009 ini sangat merugikan pihak masyarakat.

B. Saran

Meskipun peraturan daerah no.9 tahun 2009 ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat pun juga telah menjalankan perda ini namun ada baiknya pemerintah daerah kabupaten tana toraja mengawasi perda ini dengan baik jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan didalamnya demi kepentingan individu karena kesejahteraan masyarakat adalah yang utama apalagi mereka telah menjalankan kewajiban mereka dengan membayar pajak dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Susilo, Rachmad K. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif. Pendekatan Praktis, Penulisan Proposal, dan Laporan Penelitian*. UMM Press. 2008
- Irwan, Prasetya 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Koentjaraningrat 2007. *Manusia dan kebudayaan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Lembaga Daerah Kabupaten Toraja. 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.9 Tahun 2009.
- Riswandha Imawan. *Hubungan Antar Lembaga Rintihan, Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2004
- Raho, SVD Bernard. 2007. *Teori sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka publisher.
- Thomas R. Dye. *Understanding Publik Policy*, Prentice-Hall, Ne Jersey. 1981
- William N. Dunn. *Publik Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey. 1994

Sumber Internet

<https://theresiahestik.wordpress.com/2010/03/08/teori-konflik>

Dwi Susilo, Rachmad K. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

raho, SVD Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

LAMPIRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang: a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan perekonomian Bangsa Indonesia dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tersebut maka perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang :

Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Negara RI Nomor 4250);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI

Tahun 25 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) dan telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Tana Toraja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah potong Hewan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2001 Nomor 4 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b,d dan h diubah sehingga pasal 1 huruf b,d, dan h berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak dan tempat pemotongan hewan ternak diluar Rumah Potong Hewan yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan, termasuk

pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan tempat-tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

3. Ketentuan Pasal 3 (1) huruf f diubah sehingga Pasal 3 (1) huruf f berbunyi sebagai berikut :
- f. Pemeriksaan daging diluar Rumah Potong Hewan (RPH).
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (6). a . Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- Sapi dan Kerbau : Rp. 52.500,-
- Babi : Rp. 26.000,-
- Kambing dan Domba : Rp. 25.000,-

- b. Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat pemotongan hewan ternak diluar rumah potong hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Kerbau | Rp. 150.000,-/ekor |
| 2. Sapi | Rp. 100.000,-/ekor |

- | | |
|---|--------------------|
| 3. Kuda | Rp. 100.000,-/ekor |
| 4. Rusa | Rp. 75.000,-/ekor |
| 5. Babi | Rp. 75.000,-/ekor |
| 6. Kambing | Rp. 45.000,-/ekor |
| 7. Pa'piong (Daging Hewan yang sudah dimasak dalam bambu) | Rp. 30.000,- |

- c. Kepada instansi Teknis yang melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak diberikan insentif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan bersih retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 6 Agustus 2009

BUPATI TANA TORAJA

Cap/Ttd

J.A. SITURU

Diundangkan di Makale

pada tanggal 26 Oktober 2009